



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 33 TAHUN 2019**

TENTANG

RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Walikota Batu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Inspektorat, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu Tahun 2017-2022;
 10. Peraturan Walikota Batu Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Batu;
 11. Peraturan Walikota Batu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Inspektorat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2019.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Batu.
6. Inspektur adalah Inspektur Kota Batu.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BP4D adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
8. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD Kota Batu, TNI, POLRI, Kejaksaan, Akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, dunia usaha/investor, Pemerintahan Kota Batu, Pemerintahan Desa, dan Kelurahan, serta keterwakilan perempuan seperti PKK, Organisasi Kewanitaan, dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Inspektorat yang selanjutnya disebut Renstra Inspektorat adalah dokumen perencanaan Inspektorat untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Inspektorat yang selanjutnya disebut Renja Inspektorat adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Inspektorat untuk setiap program sebagai

acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Inspektorat.

15. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
16. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Inspektorat yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Inspektorat.
17. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat
18. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
19. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Inspektorat untuk memncapai sasaran.
20. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis inspektorat yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
21. Program adalah penjabaran kebijakan Inspektorat dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
22. Kegiatan Inspektorat adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Inspektorat untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
23. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
24. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

25. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
26. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
27. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
28. Hari adalah hari kerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Renja Inspektorat; dan
- b. Perubahan Renja Inpektorat.

Pasal 3

Renja Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun setiap tahun.

BAB III RENJA INSPEKTORAT

Pasal 4

Penyusunan Renja Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Inspektorat; dan
- b. hasil evaluasi Renja Inspektorat tahun lalu.

Pasal 5

Renja Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun sebelumnya;
- c. tujuan dan sasaran Inspektorat;
- d. rencana program dan kegiatan, serta pendanaan Inspektorat; dan
- e. penutup.

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT

Pasal 6

- (1) Inspektur melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Inspektorat.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, Inspektur melakukan tindakan perbaikan atau penyempurnaan melalui perubahan Renja Inspektorat.
- (3) Hasil evaluasi Renja Inspektorat menjadi bahan bagi penyusunan Renja Inspektorat untuk tahun berikutnya.
- (4) Inspektur menyampaikan laporan hasil evaluasi Renja Inspektorat kepada Walikota melalui Kepala BP4D setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

- (1) Kepala BP4D melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja Inspektorat.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Walikota melalui Kepala BP4D menyampaikan rekomendasi dan langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Inspektur.
- (3) Inspektur menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Walikota melalui Kepala BP4D.

Pasal 8

Perubahan Renja Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Renja Inspektorat Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Renja Inspektorat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota ini menjadi pedoman Inspektur dalam menyusun RKA Inspektorat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 8 Mei 2019

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 8 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2019 NOMOR 33/E

RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2019

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali sistem, prosedur dan proses perencanaan sampai penganggaran daerah hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan suatu dokumen yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan yang saling terkait dengan dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renja, penyusunan rancangan Renja, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, dan penetapan Renja. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RKPD, Renstra PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta usulan program masyarakat (*bottom up*) yang dijamin dari hasil musyawarah rencana pembangunan (musrenbang).

Hal tersebut menjadi pedoman bagi Inspektorat dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2019 sebagai bagian dari penyelenggara pemerintah di bidang pengawasan pada Pemerintah Kota Batu sehingga dapat mendukung pencapaian visi Kota Batu "*Desa Berdaya Kota Berjaya (Mewujudkan Kota Batu sebagai Sentra Agro Wisata Internasional yang Berkarakter, Berdaya Saing, dan Sejahtera*".

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melandasi dalam penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2019 antara lain:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;

18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2011-2031;
19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Batu;
20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu Tahun 2017-2022;
22. Peraturan Walikota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu; dan
23. Peraturan Walikota Batu Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Batu.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2019 dimaksudkan untuk memberikan arah atau acuan/pedoman bagi Inspektorat dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah yang bertujuan untuk menjamin bahwa program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, efisien, professional dan akuntabel.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja ini adalah:

1. menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat dalam menentukan prioritas program/kegiatan tahunan yang berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. menyediakan tolok ukur dalam pelaksanaan evaluasi kinerja tahunan Inspektorat;
3. merupakan bagian dari peran Inspektorat sebagai unsur pengawasan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menurut prinsip *Good Governance dan Clean Government*.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Renja Inspektorat Tahun 2019 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB	II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN SEBELUMNYA
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Sebelumnya dan Capaian Renstra Inspektorat
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat
	2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat
	2.4	Reviu terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
	2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB	III	TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT
	3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat
	3.3	Program dan Kegiatan
BAB	IV	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INSPEKTORAT
BAB	V	PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya dan Capaian Renstra Inspektorat

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Indikator Masukan (*Input*) untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran, SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
2. Indikator Keluaran (*Output*) merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
3. Indikator Hasil (*Outcome*) merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Berikut ini disajikan tabel untuk memberikan gambaran pelaksanaan Renja Inspektorat tahun lalu dan capaian Renstra Inspektorat.

Tabel 1 (TC 29)
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan
 Pencapaian Renstra Inspektorat s/d Tahun 2018
 (sampai dengan Semester I Tahun 2018)

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Ranstra s/d Tahun 2019	
					Target	Realisasi (s/d Semester I 2018)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
PROGRAM KEGIATAN BERSIFAT UMUM										
4.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran	100,00 persen	88,86 persen	100,00 persen	52,17 persen	52,17 persen	100,00 persen	76,00 persen	76,00 persen
4.02.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan terbayarnya Honorarium Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan dan Tenaga Pendukung Kesekretariatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 Bulan	50,00 persen	12 bulan	6 Bulan	50,00 persen
4.02.01.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jenis peralatan kerja yang diperbaiki	5 jenis	27 unit	4 jenis	1 Jenis	25,00 persen	5 jenis	1 Jenis	25,00 persen

4.02.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK yang disediakan	38 jenis	-	38 jenis	38 Jenis	100,00 persen	38 jenis	38 Jenis	100,00 persen
4.02.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7 jenis	12 bulan	7 jenis	6 Jenis	85,71 persen	7 jenis	6 Jenis	85,71 persen
4.02.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	5 jenis	3 jenis	4 jenis	4 Jenis	100,00 persen	5 jenis	4 Jenis	100,00 persen
4.02.01.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga dan bahan pembersih yang disediakan	8 jenis	7 jenis	8 jenis	8 Jenis	100,00 persen	8 jenis	8 Jenis	100,00 persen
4.02.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 jenis	5 jenis	5 jenis	4 Jenis	80,00 persen	5 jenis	4 Jenis	80,00 persen
4.02.01.01.17	Penyediaan Makan dan Minum	Jumlah bulan tersedianya makan dan minum	12 bulan	4 jenis	12 bulan	6 bulan	50,00 persen	12 bulan	6 bulan	50,00 persen
4.02.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat dan koordinasi yang dihadiri	48 kali	12 bulan	48 kali	33 kali	68,75 persen	48 kali	33 kali	68,75 persen
4.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00 persen	60,46 persen	100,00 persen	31,97 persen	31,97 persen	100,00 persen	31,97 persen	31,97 persen
4.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	13 unit	-	13 unit	2 unit	15,38 persen	13 unit	2 unit	15,38 persen

4.02.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Didiplin Aparatur Dalam Hal Pemakaian Pakaian Dinas	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	0,00 persen	0,00 persen	100,00 persen	0,00 persen	0,00 persen
4.02.01.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pegawai yang mendapat pakaian batik	50 pegawai	40 aparatur	50 pegawai	0	0,00 persen	50 pegawai	0	0,00 persen
4.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan wawasan dan pengetahuan aparatur	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	25,86 persen	25,85 persen	100,00 persen	25,86 persen	25,85 persen
4.02.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1 pegawai	1 pegawai	1 pegawai	0	0,00 persen	1 pegawai	0	0,00 persen
4.02.01.05.02	Sosialisasi dan Pembinaan Tentang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan	2 kali	51 pegawai	2 kali	1 Kali	50,00 persen	2 kali	1 Kali	50,00 persen
4.02.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mendapat bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	12 pegawai	6 pegawai	12 pegawai	4 pegawai	33,33 persen	12 pegawai	4 pegawai	33,33 persen
4.02.01.21.01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan pengembangan tugas pemeriksa dan aparatur pengawasan	31 Aparatur	65 Aparatur	26 Aparatur	12 Aparatur	46,15 persen	26 Aparatur	12 Aparatur	46,15 persen

4.02.01.21.02	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah dokumen kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	10 dokumen	1 dokumen	5 dokumen	2 dokumen	40,00 persen	5 dokumen	2 dokumen	40,00 persen
4.02.4.02.01.08	Program Perlindungan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan perlindungan Pemerintahan dan Pembangunan	100%					100%		100%
4.02.4.02.01.06.01	Pendampingan Pemeriksaan	Jumlah pelaksanaan pendampingan pemeriksaan	4 Kali					4 Kali		4 Kali
4.02.4.02.01.08.02	Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar	Jumlah pelaksanaan pembinaan pemberantasan pungutan liar	4 Kali					4 Kali		4 Kali
4.02.4.02.01.08.03	Penyelenggaraan Koordinasi TP2KP2D	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Koordinasi TP2KP2D	4 Laporan					4 Laporan		4 Laporan
PROGRAM KEGIATAN BERSIFAT KHUSUS SESUAI URUSAN DIAMPU										
4.02.01.06	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Penganggaran PD yang Berkualitas	75,00 persen	-	50,00 persen	0,00 persen	0,00 persen	50,00 persen	0,00 persen	0,00 persen
		Persentase PD yang Memiliki Dokumen SAKIP Lengkap	100,00 persen	-	100,00 persen	0,00 persen	-	100,00 persen	0,00 persen	-

4.02.01.06.XX	Evaluasi SAKIP Wilayah I	Jumlah OPD di Wilayah I dengan dokumen sakip sesuai ketentuan	9 OPD					9 OPD		9 OPD
4.02.01.06.XX	Evaluasi SAKIP Wilayah II	Jumlah OPD di Wilayah II dengan dokumen sakip sesuai ketentuan	10 OPD					10 OPD		10 OPD
4.02.01.06.XX	Evaluasi SAKIP Wilayah III	Jumlah OPD di Wilayah III dengan dokumen sakip sesuai dengan ketentuan	9 OPD					9 OPD		9 OPD
4.02.01.06.08	Evaluasi Laporan Capaian kinerja SKPD	Jumlah Laporan Hasil Reviu LAKIP Kota Batu dan Evaluasi SAKIP OPD	38 laporan	1 dokumen	38 laporan	1 laporan	2,63 persen	38 laporan	1 laporan	2,63 persen
4.02.01.06.21	Review Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Jumlah Laporan Hasil Reviu RKA dan RKAP	76 laporan	70 dokumen	76 laporan	38 laporan	50,00 persen	76 laporan	38 laporan	50,00 persen
4.02.01.06.22	Review Rencana Kerja Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Reviu RKPD dan RKPD Perubahan	2 laporan	2 dokumen	2 laporan	1 laporan	50,00 persen	2 laporan	1 laporan	50,00 persen
4.02.01.06.23	Review Penyerapan Anggaran	Jumlah Laporan Hasil Reviu Penyerapan Anggaran	37 laporan	-	34 laporan	0	0,00 persen	34 laporan	0.00	0,00 persen
4.02.01.06.24	Review Penyerapan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Laporan Hasil Reviu Penyerapan Barang/Jasa	37 laporan	-	34 laporan	0	0,00 persen	34 laporan	0.00	0,00 persen
4.02.01.20	Program Peningkatan SPI dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase OPD dan Desa bebas temuan kerugian daerah	95,00 persen	-	90,00 persen	87,50 persen	97,22 persen	90,00 persen	100 persen	97,22 persen

		Persentase rekomendasi pemeriksaan yang ditindaklanjuti	85,00 persen	-	80,00 persen	86,00 persen	107,50 persen	80,00 persen	101 persen	107,50 persen
		Persentase kasus pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100,00 persen	-	100,00 persen	104,00 persen	104,00 persen	100,00 persen	102 persen	104,00 persen
	Pengawasan Internal Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah I	Jumlah OPD/unit kerja di Wilayah I yang bebas indikasi temuan kerugian daerah	12 OPD	-				12 OPD	-	12 OPD
		Jumlah laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu di wilayah I	5 LHP	-				5 LHP	-	5 LHP
		Jumlah OPD/unit kerja di wilayah I yang mendapatkan saran perbaikan kinerja	10 OPD	-				10 OPD	-	10 OPD
	Pengawasan Internal Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah II	Jumlah OPD/unit kerja bebas indikasi temuan kerugian daerah (13 OPD)	13 OPD	-	37 Obrik			13 OPD	-	13 OPD
		Jumlah laporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (5 LHP)	5 LHP	-				5 LHP	-	5 LHP
		Jumlah OPD/unit kerja di wilayah II yang mendapatkan saran perbaikan kinerja	10 OPD	-				10 OPD	-	10 OPD

	Pengawasan Internal Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah III	Jumlah OPD/unit kerja bebas indikasi temuan kerugian daerah (12 OPD)	12 OPD	-				12 OPD	-	12 OPD
		Jumlah laporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (5 LHP)	5 LHP	-	100%			5 LHP	-	5 LHP
		Jumlah OPD/unit kerja di wilayah III yang mendapatkan saran perbaikan kinerja	10 OPD	-				10 OPD	-	10 OPD
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Wilayah I	Jumlah desa bebas indikasi kerugian daerah	4 Desa	-	19 Desa			4 Desa	-	4 Desa
		Jumlah sekolah di wilayah I dengan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS sesuai ketentuan	10 Sekolah	-				10 Sekolah	-	10 Sekolah
		Jumlah OPD dengan tingkat maturitas SPIP sampai tingkat terdefinisi	12 OPD	-	12 OPD			12 OPD	-	12 OPD
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Wilayah II	Jumlah desa bebas indikasi kerugian daerah (6 desa)	6 Desa	-				6 Desa	-	6 Desa

		Jumlah sekolah di wilayah II dengan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS sesuai ketentuan	10 Sekolah	-	21 Sekolah			10 Sekolah	-	10 Sekolah
		Jumlah OPD dengan tingkat maturitas SPIP sampai tingkat terdefinisi	13 OPD	-				13 OPD	-	13 OPD
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Wilayah III	Jumlah desa bebas indikasi kerugian daerah	9 Desa	-				9 Desa	-	9 Desa
		Jumlah sekolah di wilayah III dengan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS sesuai ketentuan	10 Sekolah	-				10 Sekolah	-	10 Sekolah
		Jumlah OPD dengan tingkat maturitas SPIP sampai tingkat terdefinisi	12 OPD	-				12 OPD	-	12 OPD
	Kegiatan reuiu dan evaluasi Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Wilayah I	Jumlah laporan hasil reuiu LK OPD/unit kerja di wilayah I	12 LHR	-				12 LHR	-	12 LHR
		Jumlah laporan hasil reuiu RKA dan RKA-P di wilayah I	24 LHR	-				24 LHR	-	24 LHR

	Kegiatan reviu dan evaluasi Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Wilayah II	Jumlah laporan hasil reviu LK OPD/unit kerja di wilayah II	1 LHR	-				1 LHR	-	1 LHR
		Jumlah laporan hasil reviu RKA dan RKA-P di wilayah II	13 LHR	-	76 LHR			13 LHR	-	13 LHR
		Jumlah laporan hasil reviu LKPD	1 LHR	-	1 LHR			1 LHR	-	1 LHR
		Jumlah laporan hasil reviu RKPD dan RKPD-P	2 LHR	-	2 LHR			2 LHR	-	2 LHR
	Kegiatan reviu dan evaluasi Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Wilayah III	Jumlah laporan hasil reviu LK OPD/unit kerja di wilayah III	12 LHR	-				12 LHR	-	12 LHR
		Jumlah laporan hasil reviu RKA dan RKA-P di wilayah III	24 LHR	-				24 LHR	-	24 LHR
		Jumlah review Lakip sesuai peraturan perundang undangan	1 LHR	-	38 LHE			1 LHR	-	1 LHR
	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Wilayah I	Jumlah hasil temuan di wilayah I yang ditindaklanjuti	25 Rekomendasi	-	-			25 Rekomendasi	-	25 Rekomendasi
	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Wilayah II	Jumlah hasil temuan di wilayah II yang ditindaklanjuti	25 Rekomendasi	-				25 Rekomendasi	-	25 Rekomendasi

	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Wilayah III	Jumlah hasil temuan di wilayah III yang ditindaklanjuti	25 Rekomendasi	-				25 Rekomendasi	-	25 Rekomendasi
	Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat Wilayah I	Jumlah pengaduan masyarakat di wilayah I yang ditangani	10 Kasus	-				10 Kasus	-	10 Kasus
	Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat Wilayah II	Jumlah pengaduan masyarakat di wilayah II yang ditangani	10 Kasus	-				10 Kasus	-	10 Kasus
	Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat Wilayah III	Jumlah pengaduan masyarakat di wilayah III yang ditangani	10 Kasus	-	30 Kasus			10 Kasus	-	10 Kasus
4.02.01.20.01	Pengawasan internal secara berkala (PKPT)	Jumlah Obrik(OPD) yang mendapatkan pemeriksaan	37 obrik	30 obrik	37 obrik	7 obrik	18,91 persen	37 obrik	7 obrik	18,91 persen
4.02.01.20.02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	30 obrik	24 obrik	30 obrik	4 obrik	13,33 persen	30 obrik	4 obrik	13,33 persen
4.02.01.20.06	Tindak Lanjut hasil temuan dan pengawasan	Persentase Temuan Pemeriksaan (BPK dan APIP) yang Ditindaklanjuti	85,00 persen	40 rekomendasi	80,00 persen	86,00 persen	107,50 persen	80,00 persen	86,00 persen	107,50 persen
4.02.01.20.08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah pelaksanaan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	2 kali	200 rekomendasi	2 kali	0 kali	0,00 persen	2 kali	0 kali	0,00 persen

4.02.01.20.09	Pendampingan Pemeriksaan	Jumlah pelaksanaan pendampingan pemeriksaan	4 kali	4 kali	4 kali	2 kali	50,00 persen	4 kali	2 kali	50,00 persen
4.02.01.20.17	Pencegahan dan pemberantasan pungutan liar	Jumlah pelaksanaan pembinaan pemberantasan pungutan liar	4 kali	-	4 kali	1 kali	25,00 persen	4 kali	1 kali	25,00 persen
4.02.01.20.18	Monev Dana Desa	Jumlah Desa yang Dilakukan Monev	19 desa	-	19 desa	0	0,00 persen	19 desa	0	0,00 persen
4.02.01.20.19	Monev dana BOS	Jumlah Laporan Hasil Monev Pengelolaan Dana BOS	21 dokumen	-	21 dokumen	0	0,00 persen	21 dokumen	0	0,00 persen
4.02.01.20.20	Evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender	Jumlah dokumen dasar pelaksanaan dan pelaporan terkait perencanaan dan penganggaran responsif gender	2 dokumen	-	2 dokumen	0	0,00 persen	2 dokumen	0	0,00 persen
4.02.01.20.21	Penyelenggaraan koordinasi TP4D	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Koordinasi Tim TP4D	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00 persen	1 dokumen	1 dokumen	100,00 persen
4.02.01.20.22	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Presentase pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	100,00 persen	-	100,00 persen	100 persen	100,00 persen	100,00 persen	100 persen	100,00 persen
4.02.01.20.23	Pemeriksaan serentak KAS Opname	Jumlah OPD yang dilakukan pemeriksaan kas opname	37 PD	-	30 PD	33 PD	110,00 persen	30 PD	33 PD	110,00 persen
4.02.01.20.24	Evaluasi SPIP	Jumlah OPD yang Dilakukan Evaluasi SPIP	37 PD	-	12 PD	10 PD	83,33 persen	12 PD	10 PD	83,33 persen
4.02.01.20.25	Penilaian mandiri reformasi birokrasi	Jumlah laporan pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi	1 dokumen	-	1 dokumen	0	0,00 persen	1 dokumen	0	0,00 persen

4.02.01.20.26	Evaluasi Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen SOP yang dibuat oleh Obyek Evaluasi	18 dokumen	-	18 dokumen	18 dokumen	100,00 persen	18 dokumen	18 dokumen	100,00 persen
4.02.01.20.27	Penanganan laporan gratifikasi	Jumlah Penanganan Laporan Gratifikasi	12 dokumen	-	12 dokumen	0	0,00 persen	12 dokumen	0	0,00 persen
4.02.01.20.28	Monev aksi pencegahan korupsi	Jumlah Laporan Hasil Monev	56 dokumen	-	56 dokumen	0	0,00 persen	56 dokumen	0	0,00 persen
4.02.01.20.30	Verifikasi LHKASN	Persentase ASN yang melaporkan LHKASN	40 persen	-	20 persen	0	0,00 persen	20 persen	0	0,00 persen
4.02.01.20.31	Penilaian internal zona integritas	Jumlah OPD yang Menerapkan Zona Integritas	1 PD	-	0 PD	0	0,00 persen	0 PD	0	0,00 persen
4.02.01.20.32	Penanganan <i>whistle blower system</i>	Adanya Sistem Pelaporan yang Memadai Berdasarkan Peraturan Peundang-undangan	1 dokumen	-	1 dokumen	0	0,00 persen	1 dokumen	0	0,00 persen
	Review LKPD	Jumlah Laporan Hasil Reviu LKPD dan PD	38 laporan	1 dokumen	38 laporan	1 laporan	2,63 persen	38 laporan	1 laporan	2,63 persen

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Inspektorat adalah unsur pendukung tugas Walikota di bidang pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengawasan. Dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Batu, Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi, mengendalikan penyelenggaraan program dan kegiatan pengawasan pemerintah daerah, BUMD serta pemerintah desa. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- 1) perencanaan dan pelaksanaan program bidang pengawasan dan administrasi umum pemerintahan, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, BUMD, pemerintahan desa, dan kasus pengaduan masyarakat;
- 2) perumusan rencana kerja dan anggaran bidang pengawasan dan administrasi umum pemerintahan, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, BUMD, pemerintahan desa, dan kasus pengaduan masyarakat;
- 3) penyusunan Standar Operasional Prosedur bidang pengawasan dan administrasi umum pemerintahan, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, BUMD, pemerintahan desa, dan kasus pengaduan masyarakat;
- 4) pengendalian data informasi bidang pengawasan dan administrasi umum pemerintahan, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, BUMD, pemerintahan desa, dan kasus pengaduan masyarakat;
- 5) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 6) pembinaan dan penanggungjawab atas pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan, dan kearsipan dilingkungan Inspektorat;
- 7) pengoordinasian pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) lainnya;
- 8) pengoordinasian pelaksanaan pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- 9) pengoordinasian pengembangan SDM, pemberdayaan, dan pembinaan jabatan fungsional;

- 10) pengoordinasian terhadap penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
- 11) pengendalian terhadap Rencana Strategis, Renja/ Renja Perubahan, RKA/ RKA Perubahan, dan DPA/ DPPA Inspektorat;
- 12) pengendalian pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 13) pengendalian pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
- 14) pengendalian pelaksanaan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang;
- 15) pengendalian terhadap pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 16) pengendalian pelaksanaan pengawasan dan penelitian mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas dan fungsi, serta wewenang Perangkat Daerah;
- 17) pengendalian pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat;
- 18) pengendalian pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat;
- 19) pengendalian dan penanggungjawab pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- 20) pengendalian pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib, pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional dan Prosedur (SOP), dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) di Daerah;
- 21) pengendalian pengaduan masyarakat di bidang pengawasan penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- 22) pengevaluasian terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
- 23) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.

Selain itu, disebutkan bahwa Struktur Organisasi Inspektorat terdiri dari 1 (satu) Pimpinan Tinggi Pratama, 3 (tiga) Administrator, 2 (dua) Pengawas, Jabatan Fungsional Auditor, Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah, dan Jabatan Pelaksana.

Pelaksanaan tugas dan fungsi ini tentu harus dapat diukur kinerjanya. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Adapun capaian kinerja Inspektorat Tahun 2018 dapat ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2 (TC 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra					Realisasi Capaian Tahun 2018 (s/d Semester I)	Proyeksi		Catatan
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Maturitas SPIP sampai level terdefinisi	100		0	80	100	100	100	N/A	80	100	
2	Persentase masing-masing Perangkat Daerah yang nilai evaluasi SAKIP minimal B	100		50	75	100	100	100	N/A	75	100	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu-isu strategis merupakan identifikasi berbagai permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan dengan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah serta kemungkinan dinamika eksternal. Kegagalan dalam menyelenggarakan pembangunan daerah dimungkinkan karena kurang selarasnya program prioritas pembangunan dengan isu strategis yang berkembang. Berdasarkan hasil analisa isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas pengawasan oleh Inspektorat adalah:

1. lemahnya penerapan SPIP pada Perangkat Daerah;
2. belum optimalnya perencanaan dan pengukuran kinerja Pemerintah Kota yang transparan dan akuntabel;
3. belum memadainya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa;
4. belum optimalnya fungsi APIP dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota;
5. belum memadainya Sumber Daya Pengawasan yang sesuai dengan kompetensi.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dibandingkan dengan rancangan Awal RKPD 2018, maka Renja Inspektorat Tahun 2019 relatif tidak terdapat perbedaan mendasar dalam susunan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Perbandingan antara Rancangan RKPD dengan Renja menjadi penting mengingat RKPD selanjutnya menjadi patokan dalam penyusunan KUA, PPAS, dan RAPBD Kota Batu. Dengan demikian amat penting untuk menyusun Renja Inspektorat dengan patokan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun yang sama demi kemudahan administrasi, sinkronisasi dan keselarasan antar Renja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Batu.

Adapun review kesesuaian antara Rancangan Awal RKPD Kota Batu Tahun 2019 dengan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3 (TC 31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Batu Tahun 2019

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
PROGRAM KEGIATAN BERSIFAT UMUM											
4.02.01.01	Program Pelayanan Kesekretariat an Perangkat Daerah		Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran	100,00 persen	1.384.429.300,00	Program Pelayanan Kesekretariat an Perangkat Daerah		Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran	100,00 persen	1.384.429.300,00	
4.02.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Perangkat Daerah			1 Peraturan Sistem Prosedur Pengawasan	8.082.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Perangkat Daerah			1 Peraturan Sistem Prosedur Pengawasan	8.082.000,00	
4.02.01.01.03	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Inspektorat		84 Item barang dan Jasa	507.653.800,00	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Inspektorat		84 Item barang dan Jasa	507.653.800,00	
4.02.01.01.04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Menyesuaikan dengan Diklat		20 Lulus Diklat Teknis	481.441.765,00	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Menyesuaikan dengan Diklat		20 Lulus Diklat Teknis	481.441.765,00	
4.02.01.01.05	Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangkat Daerah	Inspektorat		85 Jenis Aset	387.251.735,00	Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangkat Daerah	Inspektorat		85 Jenis Aset	387.251.735,00	

4.02.4.02.01.04	Program Perlindungan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah		Persentase pelaksanaan perlindungan pemerintahan dan pembangunan	100%	1.223.514.700,00	Program Perlindungan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah		Persentase pelaksanaan perlindungan pemerintahan dan pembangunan	100%	1.223.514.700,00	
4.02.4.02.01.04.01	Pendampingan Pemeriksaan	Kota Batu	Jumlah pelaksanaan pendampingan pemeriksaan	4 Pemeriksaan berkala dan tujuan tertentu	118.541.600,00	Pendampingan Pemeriksaan	Kota Batu	Jumlah pelaksanaan pendampingan pemeriksaan	4 Kali	118.541.600,00	
4.02.4.02.01.04.02	Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar	Kota Batu	Jumlah pelaksanaan pembinaan pemberantasan pungutan liar	100 Objek	586.740.700,00	Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar	Kota Batu	Jumlah pelaksanaan pembinaan pemberantasan pungutan liar	100 Objek	586.740.700,00	
4.02.4.02.01.04.03	Penyelenggaraan Koordinasi TP2KP2D	Kota Batu	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Koordinasi TP2KP2D	15 OPD, 10 Desa	518.232.400,00	Penyelenggaraan Koordinasi TP2KP2D	Kota Batu	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Koordinasi TP2KP2D	15 OPD, 10 Desa	518.232.400,00	
4.02.01.02.03	Program Peningkatan SPI dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				580.697.400,00					580.697.400,00	
			Persentase OPD dan Desa bebas temuan kerugian daerah	95,00 persen		Program Peningkatan SPI dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	87,50 persen	Persentase OPD dan Desa bebas temuan kerugian daerah	95,00 persen		
			Persentase rekomendasi pemeriksaan yang ditindaklanjuti	85,00 persen			86,00 persen	Persentase rekomendasi pemeriksaan yang ditindaklanjuti	85,00 persen		
			Persentase kasus pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100,00 persen			104,00 persen	Persentase kasus pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100,00 persen		

4.02.01.02.07	Pengawasan Internal Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah I	Kota Batu	Jumlah OPD/unit kerja di Wilayah I yang bebas indikasi temuan kerugian daerah	12 OPD	81.878.000,00	Pengawasan Internal Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah I		Jumlah OPD/unit kerja di Wilayah I yang bebas indikasi temuan kerugian daerah	100 12 OPD, 5 LHP, 10 OPD	81.878.000,00	
			Jumlah laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu di wilayah I	5 LHP				Jumlah laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu di wilayah I	5 LHP		
			Jumlah OPD/unit kerja di wilayah I yang mendapatkan saran perbaikan kinerja	10 OPD				Jumlah OPD/unit kerja di wilayah I yang mendapatkan saran perbaikan kinerja	10 OPD		
4.02.01.02.23	Pengawasan Internal Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah II	Pemerintah Kota Batu	Jumlah OPD/unit kerja bebas indikasi temuan kerugian daerah (13 OPD)	13 OBRIK	91.046.600,00	Pengawasan Internal Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah II	Pemerintah Kota Batu	Jumlah OPD/unit kerja bebas indikasi temuan kerugian daerah (13 OPD)	13 OBRIK	91.046.600,00	
			Jumlah laporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (5 LHP)	5 LHP				Jumlah laporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (5 LHP)	5 LHP		
			Jumlah OPD/unit kerja di wilayah II yang mendapatkan saran perbaikan kinerja	10 OPD				Jumlah OPD/unit kerja di wilayah II yang mendapatkan saran perbaikan kinerja	10 OPD		
4.02.01.02.25	Pengawasan Internal Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah III	Pemerintah Kota Batu	Jumlah OPD/unit kerja bebas indikasi temuan kerugian daerah (12 OPD)	12 OBRIK, 5 LHP, 12 OPD	110.530.000,00	Pengawasan Internal Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah III	Pemerintah Kota Batu	Jumlah OPD/unit kerja bebas indikasi temuan kerugian daerah (12 OPD)	12 OBRIK, 5 LHP, 12 OPD	110.530.000,00	
			Jumlah laporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (5 LHP)	5 LHP				Jumlah laporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (5 LHP)	5 LHP		

			Jumlah OPD/unit kerja di wilayah III yang mendapatkan saran perbaikan kinerja	10 OPD				Jumlah OPD/unit kerja di wilayah III yang mendapatkan saran perbaikan kinerja	10 OPD		
4.02.01.02.05	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Wilayah I	Pemerintah Kota Batu	Jumlah desa bebas indikasi kerugian daerah	10 Desa	50.335.300,00	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Wilayah I	Pemerintah Kota Batu	Jumlah desa bebas indikasi kerugian daerah	10 Desa	50.335.300,00	
			Jumlah sekolah di wilayah I dengan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS sesuai ketentuan	10 Sekolah				Jumlah sekolah di wilayah I dengan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS sesuai ketentuan	10 Sekolah		
			Jumlah OPD dengan tingkat maturitas SPIP sampai tingkat terdefinisi	9 OPD				Jumlah OPD dengan tingkat maturitas SPIP sampai tingkat terdefinisi	9 OPD		
4.02.01.02.09	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Wilayah II	Pemerintah Kota Batu	Jumlah desa bebas indikasi kerugian daerah (6 desa)	6 Desa	36.227.200,00	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Wilayah II	Pemerintah Kota Batu	Jumlah desa bebas indikasi kerugian daerah (6 desa)	6 Desa	36.227.200,00	
			Jumlah sekolah di wilayah II dengan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS sesuai ketentuan	10 Sekolah				Jumlah sekolah di wilayah II dengan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS sesuai ketentuan	10 Sekolah		

			Jumlah OPD dengan tingkat maturitas SPIP sampai tingkat terdefinisi	13 OPD				Jumlah OPD dengan tingkat maturitas SPIP sampai tingkat terdefinisi	13 OPD		
4.02.01.02.13	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Wilayah III	Pemerintah Kota Batu	Jumlah desa bebas indikasi kerugian daerah	9 Desa	51.643.700,00	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Wilayah III	Pemerintah Kota Batu	Jumlah desa bebas indikasi kerugian daerah	9 Desa	51.643.700,00	
			Jumlah sekolah di wilayah III dengan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS sesuai ketentuan	10 Sekolah				Jumlah sekolah di wilayah III dengan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS sesuai ketentuan	10 Sekolah		
			Jumlah OPD dengan tingkat maturitas SPIP sampai tingkat terdefinisi	12 OPD				Jumlah OPD dengan tingkat maturitas SPIP sampai tingkat terdefinisi	12 OPD		
4.02.01.02.17	Kegiatan reviu dan evaluasi Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Wilayah I	Pemerintah Kota Batu	Jumlah laporan hasil reviu LK OPD/unit kerja di wilayah I	12 LHR	22.887.400,00	Kegiatan reviu dan evaluasi Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Wilayah I		Jumlah laporan hasil reviu LK OPD/unit kerja di wilayah I	12 LHR	22.887.400,00	
			Jumlah laporan hasil reviu RKA dan RKA-P di wilayah I	24 LHR				Jumlah laporan hasil reviu RKA dan RKA-P di wilayah I	24 LHR		

4.02.01.02.15	Kegiatan reviu dan evaluasi Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Wilayah II	Pemerintah Kota Batu	Jumlah laporan hasil reviu LK OPD/unit kerja di wilayah II	13 OBRIK	52.228.200,00	Kegiatan reviu dan evaluasi Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Wilayah II	Pemerintah Kota Batu	Jumlah laporan hasil reviu LK OPD/unit kerja di wilayah II	13 OBRIK	52.228.200,00	
			Jumlah laporan hasil reviu RKA dan RKA-P di wilayah II	13 LHR	14.591.011,00			Jumlah laporan hasil reviu RKA dan RKA-P di wilayah II	13 LHR		
			Jumlah laporan hasil reviu LKPD	1 LHR	14.591.010,00			Jumlah laporan hasil reviu LKPD	1 LHR		
			Jumlah laporan hasil reviu RKPD dan RKPD-P	2 LHR	27.105.225,00			Jumlah laporan hasil reviu RKPD dan RKPD-P	2 LHR		
4.02.01.02.11	Kegiatan reviu dan evaluasi Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Wilayah III	Pemerintah Kota Batu	Jumlah laporan hasil reviu LK OPD/unit kerja di wilayah III	1 LHR	29.860.600,00	Kegiatan reviu dan evaluasi Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Wilayah III	Pemerintah Kota Batu	Jumlah laporan hasil reviu LK OPD/unit kerja di wilayah III	12 LHR	29.860.600,00	
			Jumlah laporan hasil reviu RKA dan RKA-P di wilayah III	24 LHR	8.023.400,00			Jumlah laporan hasil reviu RKA dan RKA-P di wilayah III	24 LHR	8.023.400,00	
			Jumlah review Lakip sesuai peraturan perundang undangan	1 LHR	22.388.500,00			Jumlah review Lakip sesuai peraturan perundang undangan	1 LHR	22.388.500,00	

4.02.01.02.01	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Wilayah I	Pemerintah Kota Batu	Jumlah hasil temuan di wilayah I yang ditindaklanjuti	25 Rekomendasi	5.945.300,00	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Wilayah I		Jumlah hasil temuan di wilayah I yang ditindaklanjuti	25 Rekomendasi	5.945.300,00	
4.02.01.02.27	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Wilayah II	Pemerintah Kota Batu	Jumlah hasil temuan di wilayah II yang ditindaklanjuti	25 Rekomendasi	9.548.200,00	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Wilayah II	Pemerintah Kota Batu	Jumlah hasil temuan di wilayah II yang ditindaklanjuti	25 Rekomendasi	9.548.200,00	
4.02.01.02.29	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Wilayah III	Pemerintah Kota Batu	Jumlah hasil temuan di wilayah III yang ditindaklanjuti	25 Rekomendasi	8.830.600,00	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Wilayah III	Pemerintah Kota Batu	Jumlah hasil temuan di wilayah III yang ditindaklanjuti	25 Rekomendasi	8.830.600,00	
4.02.01.02.03	Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat Wilayah I	Pemerintah Kota Batu	Jumlah pengaduan masyarakat di wilayah I yang ditangani	10 Kasus	9.912.100,00	Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat Wilayah I	Pemerintah Kota Batu	Jumlah pengaduan masyarakat di wilayah I yang ditangani	10 Kasus	9.912.100,00	
4.02.01.02.19	Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat Wilayah II	Pemerintah Kota Batu	Jumlah pengaduan masyarakat di wilayah II yang ditangani	10 Kasus	9.912.100,00	Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat Wilayah II	Pemerintah Kota Batu	Jumlah pengaduan masyarakat di wilayah II yang ditangani	10 Kasus	9.912.100,00	
4.02.01.02.21	Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat Wilayah III	Pemerintah Kota Batu	Jumlah pengaduan masyarakat di wilayah III yang ditangani	10 Kasus	9.912.100,00	Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat Wilayah III	Pemerintah Kota Batu	Jumlah pengaduan masyarakat di wilayah III yang ditangani	10 Kasus	9.912.100,00	
4.02.01.02.03	Program Peningkatan SPI dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				580.697.400,00					580.697.400,00	
			Persentase OPD dan Desa bebas temuan kerugian daerah	95,00 persen		Program Peningkatan SPI dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	87,50 persen	Persentase OPD dan Desa bebas temuan kerugian daerah	95,00 persen		

			Persentase rekomendasi pemeriksaan yang ditindaklanjuti	85,00 persen			86,00 persen	Persentase rekomendasi pemeriksaan yang ditindaklanjuti	85,00 persen		
			Persentase kasus pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100,00 persen			104,00 persen	Persentase kasus pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100,00 persen		
4.02.01.02.07	Pengawasan Internal Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah I	Kota Batu	Jumlah OPD/unit kerja di Wilayah I yang bebas indikasi temuan kerugian daerah	12 OPD	81.878.000,00	Pengawasan Internal Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah I		Jumlah OPD/unit kerja di Wilayah I yang bebas indikasi temuan kerugian daerah	100 12 OPD, 5 LHP, 10 OPD	81.878.000,00	
			Jumlah laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu di wilayah I	5 LHP				Jumlah laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu di wilayah I	5 LHP		
			Jumlah OPD/unit kerja di wilayah I yang mendapatkan saran perbaikan kinerja	10 OPD				Jumlah OPD/unit kerja di wilayah I yang mendapatkan saran perbaikan kinerja	10 OPD		
4.02.01.02.23	Pengawasan Internal Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah II	Pemerintah Kota Batu	Jumlah OPD/unit kerja bebas indikasi temuan kerugian daerah (13 OPD)	13 OBRIK	91.046.600,00	Pengawasan Internal Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah II	Pemerintah Kota Batu	Jumlah OPD/unit kerja bebas indikasi temuan kerugian daerah (13 OPD)	13 OBRIK	91.046.600,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Oleh karena Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang mengampu urusan penunjang Pemerintahan Daerah, maka Inspektorat relatif tidak menangani program/kegiatan yang bersifat usulan dari masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pengawasan secara nasional untuk Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019. Kebijakan pembinaan dan pengawasan ini merupakan acuan, sasaran dan prioritas pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun uraian fokus kegiatan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan peningkatan kapabilitas APIP:
 - a. bimbingan teknis pemeriksaan investigatif;
 - b. bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa;
 - c. bimbingan teknis penerapan sistem manajemen resiko.
2. Kegiatan asistensi/pendampingan:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - b. pengadaan barang dan jasa;
 - c. opersionalisasi sapu bersih pungutan liar; dan
 - d. pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah.
3. Kegiatan rewiu:
 - a. rewiu RPJMD;
 - b. rewiu RKPD;
 - c. rewiu RKA SKDP;
 - d. rewiu LKPD;
 - e. rewiu laporan kinerja;
 - f. rewiu penyerapan anggaran;
 - g. rewiu penyerapan pengadaan barang dan jasa.
4. Kegiatan monitoring dan evaluasi:
 - a. tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;
 - b. tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
 - c. dana desa;
 - d. dana BOS;
 - e. aksi pencegahan korupsi;
 - f. evaluasi SPIP;
 - g. penilaian mandiri reformasi birokrasi;
 - h. penanganan laporan gratifikasi;
 - i. penanganan *Whistle Blower System*;
 - j. penanganan benturan kepentingan;
 - k. penilaian internal zona integritas;
 - l. verifikasi LHKPN/LHKASN;
 - m. verifikasi pelaporan RAD-PPK;

- n. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - o. perencanaan dan penganggaran responsif gender; dan
 - p. pelayanan publik.
5. Kegiatan pemeriksaan:
- a. kinerja; dan
 - b. dengan tujuan tertentu.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat melalui berbagai kegiatan dalam satu tahun. Dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat program dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam satu tahun.

Adapun penetapan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Inspektorat di Tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Tahun 2019

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pengawasan internal	Persentase maturitas SPIP PD sampai tingkat terdefinisi	50
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Persentase PD yang memiliki dokumen SAKIP yang berkualitas	100

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditentukan sebagai arah dari strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang sangat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan organisasi dalam merealisasikan program kerja yang ditetapkan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan yang mendukungnya. Program dan kegiatan Inspektorat untuk Tahun 2019 dapat dilihat dalam Tabel berikut:

No	KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN (Outcome - Kualitatif)	RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)									CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA (OUTPUT)	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
							BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	APBD II (DAU/PAD)	APBD I (BANTUAN KEUANGAN)	APBN (DAK FISIK/ DAK NON FISIK/ DHCT/ PAJAK ROKOK)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
A.	PROGRAM KEGIATAN BERSIFAT UMUM														
	4.02.4.02.01.01	Program pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan	Inspektoral	74	1.384.429.300	291.202.000	889.504.900	203.722.400	1.384.429.300	0	0		75	1.484.429.300
1	4.02.4.02.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	1 Dokumen Jakwas dan telaah 16 SOP	Inspektoral	100	8.082.000	0	8.082.000	0	8.082.000	0	0		100%	5.082.000
2	4.02.4.02.01.01.03	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan kebutuhan operasional kantor tepat waktu tepat mutu	Inspektoral	100	507.653.800	269.852.000	237.801.800	0	507.653.800	0	0		100%	577.653.800
3	4.02.4.02.01.01.04	Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur	Jumlah APIP yang mendapatkan pelatihan kompetensi 26 orang	Inspektoral	100	481.441.765	21.350.000	460.091.765	0	481.441.765	0	0		100%	541.441.765

No	KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN (Outcome - Kualitatif)	RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)									CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA (OUTPUT)	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	SUMBER DANA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
										APBD II (DAU/PAD)	APBD I (BANTUAN KEUANGAN)	APBN (DAK FISIK/ DAK NON FISIK/ DHCT/ PAJAK ROKOK)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	4.02.4.02.0 1.01.05	Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan Perangkat Daerah	Operasional sarana dinas tanpa kendala	Inspektorat		387.251.735	0	183.529.335	203.722.400	387.251.735	0	0			
	4.02.4.02.01.04	Program Perlindungan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan perlindungan Pemerintahan dan Pembangunan		100%	1.223.514.700,00	1.033.100.000,00	190.414.700,00	0,00	1.223.514.700,00	0,00	0,00			1.278.050.856,00
5	4.02.4.02.0 1.04.01	Pendampingan Pemeriksaan	Jumlah pelaksanaan pendampingan pemeriksaan	Kota Batu	4 Kali	118.541.600,00	48.500.000,00	70.041.600,00	0,00	118.541.600,00	0,00	0,00		4 Kali	57.101.232,00
6	4.02.4.02.0 1.04.02	Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar	Jumlah pelaksanaan pembinaan pemberantasan pungutan liar	Kota Batu	4 Kali	586.740.700,00	534.600.000,00	52.140.700,00	0,00	586.740.700,00	0,00	0,00		4 Kali	641.360.853,00
7	4.02.4.02.0 1.04.03	Penyelenggaraan Koordinasi TP2KP2D	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Koordinasi TP2KP2D	Kota Batu	4 Laporan	518.232.400,00	450.000.000,00	68.232.400,00	0,00	518.232.400,00	0,00	0,00		4 Laporan	579.588.771,00

No	KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN (Outcome - Kualitatif)	RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)									CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA (OUTPUT)	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
							BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	APBD II (DAU/PAD)	APBD I (BANTUAN KEUANGAN)	APBN (DAK FISIK/ DAK NON FISIK/ DHCT/ PAJAK ROKOK)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B.	PROGRAM KEGIATAN BERSIFAT KHUSUS														
	4.02.4.02.01.03	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase OPD yang memiliki dokumen SAKIP sesuai ketentuan			28.215.400,00	0,00	28.215.400,00	0,00	28.215.400,00	0,00	0,00		100%	28.215.400,00
8	4.02.4.02.01.03.01	Evaluasi SAKIP Wilayah I	Jumlah OPD di Wilayah I dengan dokumen sakiip sesuai ketentuan		9 OPD	10.674.200,00	0,00	10.674.200,00	0,00	10.674.200,00	0,00	0,00		9 OPD	10.674.200,00
9	4.02.4.02.01.03.02	Evaluasi SAKIP Wilayah II	Jumlah OPD di Wilayah II dengan dokumen sakiip sesuai ketentuan		10 OPD	6.631.700,00	0,00	6.631.700,00	0,00	6.631.700,00	0,00	0,00		10 OPD	6.631.700,00
10	4.02.4.02.01.03.03	Evaluasi SAKIP Wilayah III	Jumlah OPD di Wilayah III dengan dokumen sakiip sesuai dengan ketentuan		9 OPD	10.909.500,00	0,00	10.909.500,00	0,00	10.909.500,00	0,00	0,00		9 OPD	10.909.500,00

No	KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN (Outcome - Kualitatif)	RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)									CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA (OUTPUT)	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	SUMBER DANA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
										APBD II (DAU/PAD)	APBD I (BANTUAN KEUANGAN)	APBN (DAK FISIK/ DAK NON FISIK/ DHCT/ PAJAK ROKOK)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	4.02.4.02.01.03	Program Peningkatan SPI dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				580.697.400,00	58.585.000,00	522.112.400,00	0,00	580.697.400,00	0,00	0,00		100 persen	580.697.400,00
			Persentase OPD dan Desa bebas indikasi temuan kerugian daerah		95%						0,00	0,00		95 persen	
			Persentase tindak lanjut temuan pemeriksaan		90%						0,00	0,00		90 persen	
			Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti		100%						0,00	0,00		100 persen	
11	4.02.4.02.01.02.07	Pengawasan Internal Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah I	Jumlah OPD/unit kerja di Wilayah I yang bebas indikasi temuan kerugian daerah		12 OPD	81.878.000	17.744.000,00	64.134.000,00	0,00	81.878.000	0,00	0,00		12 OPD	81.878.000,00

No	KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN (Outcome - Kualitatif)	RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)									CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA (OUTPUT)	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	SUMBER DANA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
										APBD II (DAU/PAD)	APBD I (BANTUAN KEUANGAN)	APBN (DAK FISIK/ DAK NON FISIK/ DHCT/ PAJAK ROKOK)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Jumlah laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu di wilayah I		5 LHP		0,00		0,00	0	0,00	0,00		5 LHP	
			Jumlah OPD/unit kerja di wilayah I yang mendapatkan saran perbaikan kinerja		10 OPD		0,00		0,00	0	0,00	0,00		12 OPD	
12	4.02.4.02.01.02.23	Pengawasan Internal Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah II	Jumlah OPD/unit kerja bebas indikasi temuan kerugian daerah (13 OPD)		13 OPD	91.046.600	17.744.000,00	73.302.600,00	0,00	91.046.600	0,00	0,00		13 OPD	91.046.600,00
			Jumlah laporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (5 LHP)		5 LHP		0,00		0,00	0	0,00	0,00		5 LHP	

No	KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN (Outcome - Kualitatif)	RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)									CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA (OUTPUT)	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
							BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	APBD II (DAU/PAD)	APBD I (BANTUAN KEUANGAN)	APBN (DAK FISIK/ DAK NON FISIK/ DHCT/ PAJAK ROKOK)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Jumlah OPD/unit kerja di wilayah II yang mendapatkan saran perbaikan kinerja		10 OPD		0,00		0,00	0	0,00	0,00		12 OPD	
13	4.02.4.02.0 1.02.25	Pengawasan Internal Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah III	Jumlah OPD/unit kerja bebas indikasi temuan kerugian daerah (12 OPD)		12 OPD	110.530.000	17.744.000,00	92.786.000,00	0,00	110.530.000	0,00	0,00		12 OPD	110.530.000,00
			Jumlah laporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (5 LHP)		5 LHP		0,00		0,00	0	0,00	0,00		5 LHP	
			Jumlah OPD/unit kerja di wilayah III yang mendapatkan saran perbaikan kinerja		10 OPD		0,00		0,00	0	0,00	0,00		12 OPD	

No	KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN (Outcome - Kualitatif)	RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)									CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA (OUTPUT)	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	SUMBER DANA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
										APBD II (DAU/PAD)	APBD I (BANTUAN KEUANGAN)	APBN (DAK FISIK/ DAK NON FISIK/ DHCT/ PAJAK ROKOK)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
14	4.02.4.02.0 1.02.05	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Wilayah I	Jumlah desa bebas indikasi kerugian daerah		4 Desa	50.335.300	0,00	50.335.300	0,00	50.335.300	0,00	0,00		4 Desa	50.335.300,00
			Jumlah sekolah di wilayah I dengan pertanggungja waban pengelolaan dana BOS sesuai ketentuan		10 Sekolah		0,00		0,00	0	0,00	0,00		10 Sekolah	
			Jumlah OPD dengan tingkat maturitas SPIP sampai tingkat terdefinisi		12 OPD		0,00		0,00	0	0,00	0,00		12 OPD	

No	KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN (Outcome - Kualitatif)	RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)									CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA (OUTPUT)	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	SUMBER DANA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
										APBD II (DAU/PAD)	APBD I (BANTUAN KEUANGAN)	APBN (DAK FISIK/ DAK NON FISIK/ DHCT/ PAJAK ROKOK)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
15	4.02.4.02.0 1.02.09	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Wilayah II	Jumlah desa bebas indikasi kerugian daerah (6 desa)		6 Desa	36.227.200	0,00	36.227.200,00	0,00	36.227.200	0,00	0,00		6 Desa	36.227.200,00
			Jumlah sekolah di wilayah II dengan pertanggungja waban pengelolaan dana BOS sesuai ketentuan		10 Sekolah		0,00		0,00	0	0,00	0,00		10 Sekolah	
			Jumlah OPD dengan tingkat maturitas SPIP sampai tingkat terdefinisi		13 OPD		0,00		0,00	0	0,00	0,00		13 OPD	

No	KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN (Outcome - Kualitatif)	RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)									CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA (OUTPUT)	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	SUMBER DANA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
										APBD II (DAU/PAD)	APBD I (BANTUAN KEUANGAN)	APBN (DAK FISIK/ DAK NON FISIK/ DHCT/ PAJAK ROKOK)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
16	4.02.4.02.0 1.02.13	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Wilayah III	Jumlah desa bebas indikasi kerugian daerah		9 Desa	51.643.700	0,00	51.643.700	0,00	51.643.700	0,00	0,00		9 Desa	51.643.700,00
			Jumlah sekolah di wilayah III dengan pertanggungja waban pengelolaan dana BOS sesuai ketentuan		10 Sekolah		0,00		0,00	0	0,00	0,00		10 Sekolah	
			Jumlah OPD dengan tingkat maturitas SPIP sampai tingkat terdefinisi		12 OPD		0,00		0,00	0	0,00	0,00		12 OPD	

No	KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN (Outcome - Kualitatif)	RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)									CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA (OUTPUT)	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	SUMBER DANA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
										APBD II (DAU/PAD)	APBD I (BANTUAN KEUANGAN)	APBN (DAK FISIK/ DAK NON FISIK/ DHCT/ PAJAK ROKOK)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
17	4.02.4.02.0 1.02.17	Kegiatan reviu dan evaluasi Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Wilayah I	Jumlah laporan hasil reviu LK OPD/unit kerja di wilayah I		12 LHR	22.887.400	0,00		0,00		0,00	0,00		12 LHR	22.887.400,00
			Jumlah laporan hasil reviu RKA dan RKA-P di wilayah I		24 LHR		0,00		0,00	0	0,00	0,00		24 LHR	
18	4.02.4.02.0 1.02.15	Kegiatan reviu dan evaluasi Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Wilayah II	Jumlah laporan hasil reviu LK OPD/unit kerja di wilayah II		1 LHR	52.228.200	5.353.000,00	46.875.200,00	0,00		0,00	0,00		1 LHR	52.228.200,00
			Jumlah laporan hasil reviu RKA dan RKA-P di wilayah II		13 LHR		0,00		0,00	0	0,00	0,00		13 LHR	
			Jumlah laporan hasil reviu LKPD		1 LHR		0,00		0,00	0	0,00	0,00		1 LHR	

No	KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN (Outcome - Kualitatif)	RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)									CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA (OUTPUT)	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	SUMBER DANA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
										APBD II (DAU/PAD)	APBD I (BANTUAN KEUANGAN)	APBN (DAK FISIK/ DAK NON FISIK/ DHCT/ PAJAK ROKOK)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Jumlah laporan hasil revidi RKPDP dan RKPDP-P		2 LHR		0,00		0,00	0	0,00	0,00		2 LHR	
19	4.02.4.02.0 1.02.11	Kegiatan revidi dan evaluasi Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Wilayah III	Jumlah laporan hasil revidi LK OPD/unit kerja di wilayah III		12 LHR	29.860.600	0,00		0,00	29.860.600	0,00	0,00		12 LHR	29.860.600,00
			Jumlah laporan hasil revidi RKA dan RKA-P di wilayah III		24 LHR		0,00	8.023.400,00	0,00	8.023.400	0,00	0,00		24 LHR	
			Jumlah review Lakip sesuai peraturan perundang undangan		1 LHR		0,00	22.388.500,00	0,00	22.388.500	0,00	0,00		1 LHR	
20	4.02.4.02.0 1.02.01	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Wilayah I	Jumlah hasil temuan di wilayah I yang ditindaklanjuti		25 Rekomen dasi	5.945.300	0,00		0,00	5.945.300	0,00	0,00		25 Rekomen dasi	5.945.300,00
21	4.02.4.02.0 1.02.27	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Wilayah II	Jumlah hasil temuan di wilayah II yang ditindaklanjuti		25 Rekomen dasi	9.548.200	0,00		0,00	9.548.200	0,00	0,00		25 Rekomen dasi	9.548.200,00

No	KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN (Outcome - Kualitatif)	RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)									CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA (OUTPUT)	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	SUMBER DANA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
										APBD II (DAU/PAD)	APBD I (BANTUAN KEUANGAN)	APBN (DAK FISIK/ DAK NON FISIK/ DHCT/ PAJAK ROKOK)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
22	4.02.4.02.0 1.02.29	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Wilayah III	Jumlah hasil temuan di wilayah III yang ditindaklanjuti		25 Rekomen dasi	8.830.600	0,00	8.830.600	0,00	8.830.600	0,00	0,00		25 Rekomen dasi	8.830.600,00
23	4.02.4.02.0 1.02.03	Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat Wilayah I	Jumlah pengaduan masyarakat di wilayah I yang ditangani		10 Kasus	9.912.100	0,00	9.912.100	0,00	9.912.100	0,00	0,00		10 Kasus	9.912.100,00
24	4.02.4.02.0 1.02.19	Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat Wilayah II	Jumlah pengaduan masyarakat di wilayah II yang ditangani		10 Kasus	9.912.100	0,00	9.912.100	0,00	9.912.100	0,00	0,00		10 Kasus	9.912.100,00
25	4.02.4.02.0 1.02.21	Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat Wilayah III	Jumlah pengaduan masyarakat di wilayah III yang ditangani		10 Kasus	9.912.100	0,00	9.912.100	0,00	9.912.100	0,00	0,00		10 Kasus	9.912.100,00
Jumlah						3.216.856.800,00	1.382.887.000,00	1.630.247.400,00	203.722.400,00	3.216.856.800,00	0,00	0,00			3.216.856.800,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT

Renja Inspektorat Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Renja ini dapat tercapai salah satunya apabila ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan dalam kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2019. Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran, pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya. Rencana kerja dan pendanaan Inspektorat telah dijabarkan pada Bab III yaitu pada Tabel 5 (TC. 33 di atas).

BAB V

PENUTUP

Dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai aparat pengawasan, Inspektorat berpedoman pada Rencana Strategis Tahun 2017-2022 yang kemudian dijabarkan pada Rencana Kerja Tahunan. Melalui penyusunan dokumen Renja Tahun 2019 yang berkualitas, diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja pengawasan pada Inspektorat sesuai tugas dan fungsinya.

Guna mengantisipasi perubahan dinamika lingkungan internal dan eksternal, maka selama kurun masa berlakunya Renja Tahun 2019 dapat dilakukan upaya evaluasi dan penyesuaian. Penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2019 tentu masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan, untuk itu diharapkan saran masukan demi kesempurnaan Renja Inspektorat Tahun 2019.

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO